



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN	KODE MATA KULIAH: HK 402	RUMPUN MATA KULIAH: MATA KULIAH LANJUTAN	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 1	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 AGUSTUS 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN): 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		SIKAP DAN TATA NILAI			
		S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;		
		S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		S.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		S.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
		S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
		S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		

		S.10	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		KETERAMPILAN UMUM	
		KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.04	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
		KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
		KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		KETERAMPILAN KHUSUS	
		KK.01	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
		KK.02	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.

		KK.04	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
		PENGETAHUAN	
		P.03	Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai matakuliah wajib bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia, matakuliah Hukum Kelautan dan Perikanan mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Kelautan dan Perikanan untuk (1) mengkritisi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori Hukum Kelautan dan Perikanan yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran Hukum Kelautan dan Perikanan yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian Hukum Kelautan dan Perikanan, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kelautan dan Perikanan dalam Menjawab kedaulatan maritim negara yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.				
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup mata kuliah Hukum Kelautan dan Perikanan. 2. Sejarah perkembangan Hukum Kelautan dan Perikanan. 3. Berbagai istilah dalam Hukum Kelautan dan Perikanan. 4. Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia 5. Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global. 6. Latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara. 7. Kedaulatan maritim Indonesia. 8. Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut. 9. Kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat. 				
PUSTAKA	<table border="1"> <tr> <td>UTAMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997. 2. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI. 3. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998. 4. Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI. 6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 7. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku I</i>, 2016. 8. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku II</i>, 2016. 9. Maritime Review, <i>Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar Di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju</i>, 2017. </td> </tr> </table>	UTAMA			<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997. 2. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI. 3. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998. 4. Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI. 6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 7. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku I</i>, 2016. 8. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku II</i>, 2016. 9. Maritime Review, <i>Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar Di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju</i>, 2017.
UTAMA					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997. 2. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI. 3. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998. 4. Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI. 6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 7. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku I</i>, 2016. 8. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku II</i>, 2016. 9. Maritime Review, <i>Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar Di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju</i>, 2017. 				

	PENDUKUNG	1. Journal of East Asia and International Law Volume 10 Number 1. 2. Journal of East Asia and International Law Volume 12 Number 1.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING		
MATA KULIAH SYARAT	-	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup mata kuliah Hukum Kelautan dan Perikanan	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup mata kuliah Hukum Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	<p>Pembukaan kuliah menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah 	3 %
II & III	Mahasiswa mampu memahami tentang sejarah perkembangan hukum laut Internasional.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah perkembangan hukum laut Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan perkembangan hukum laut • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah perkembangan hukum laut internasional 2. Sejarah perkembangan hukum laut indonesia 	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV & V	Mahasiswa mampu memahami tentang berbagai istilah dalam Hukum Kelautan dan Perikanan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan berbagai istilah dalam Hukum Kelautan dan Perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan berbagai istilah dalam Hukum Kelautan dan Perikanan. • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Think Pair Share 	1. Archipelagic State 2. Archipelagic Outlook 3. Indonesian Maritime Continent 4. World Maritime Fulcrum	12%
VI & VII	Mahasiswa mampu memahami tentang Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Think Pair Share 	1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Manusia; 2. Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3. Tatakelola dan Kelembagaan Laut; 4. Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan; 5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut;	10 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					6. Budaya Bahari; 7. Diplomasi Maritim	
VIII	MID SEMESTER		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	MID SEMESTER	15%
IX & X	Mahasiswa mampu memahami tentang Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi. • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Small Group.</i> • <i>Discussion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Nusantara. 2. Pembangunan Berkelanjutan; 3. Ekonomi Biru; 4. Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan; 5. Partisipasi; 6. Kesetaraan; 7. Pemerataan 	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XI	Mahasiswa mampu memahami tentang latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah nteraktif • <i>Problem Based Learning</i> 	Berbagai perjanjian internasional yang mengatur perbatasan maritim antara RI dan berbagai Negara tetangga.	5%
XII	Mahasiswa mampu memahami tentang kedaulatan maritim Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kedaulatan maritim Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	1. Posisi geografis 2. wilayah perairan yang sangat luas 3. Karakter dan budaya maritime 4. Kekuatan Armada Laut.	5%
XIII & XIV	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Kebijakan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	1. Penentuan garis pangkal; 2. Menetapkan ALKI; 3. Perlindungan laut	10%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tentang Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut	Tantangan Keamanan di Laut	terhadap Tantangan Keamanan di Laut • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.		territorial; 4. Perlindungan ZEEI sebagai economy resources dan parameter pertahanan berlapis; 5. Keamanan maritime internasional.	
XV	Mahasiswa mampu memahami tentang kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	• Kuliah Interaktif • Case Study	1. Putusan ICJ 2. Delimitasi Maritim di Ambalat	6%
XVI	FINAL TEST		• Ketepatan menjawab soal • kejujuran	UJIAN TERTULIS	FINAL TEST	18%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Lingkungan	KODE MATA KULIAH: HKK 406	RUMPUN MATA KULIAH: Kenegaraan	BOBOT (SKS): 3 SKS	SEMESTER: 4	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022	
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi Said Munawar, SH, MH	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<ol style="list-style-type: none">1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan2. Mampu mengembangkan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset ilmiah, baik normatif, empirik maupun transendental3. Mampu mengembangkan keilmuan hukum melalui diseminasi gagasan dan riset ilmiah dengan pendekatan inter atau multidisipliner4. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam5. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum sumber daya alam dan mentransformasikan kepada peserta didik				
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none">1. Menguraikan mengenai pengertian hukum Lingkungan2. Menguraikan Permasalah global lingkungan3. Menguraikan Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup4. Menguraikan Urgensi lingkungan hidup5. Menguraikan Hukum kebiasaan internasional6. Menguraikan Instrumen adminsitrasi lingkungan7. Menguraikan Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif8. Menguraikan Mekanisme penegakan instrument hukum adminstratif lingkungan hidup9. Menguraikan Ragam sanksi administratif10. Menguraikan instrument hukum perdata lingkungan hidup:11. Menguraikan Instumen hukum perdata classs action12. Menguraikan Instrumen hukum perdata legal standing13. Menguraikan Instrumen hukum pidana lingkungan14. Menguraikan ADR				

		<p>15. Menguraikan Arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan</p> <p>16. Menguraikan Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang serta Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.</p>
--	--	---

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	<p>Mata Kuliah ini dirancang untuk mendeskripsikan tentang Hukum Lingkungan yang memiliki sifat lintas bidang, berupa hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui lembaga pengadilan dan nonpengadilan melalui lembaga alternatif. Pembaruan hukum lingkungan ke depan diharapkan diakomodasi pemikiran (1) menempatkan masyarakat sebagai stakeholders yang menentukan dalam pengelolaan (sengketa) lingkungan, (2) mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi lingkungan hidup dalam setiap keputusan (kebijakan), (3) melakukan rekonstrukturasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi, dan (4) pengembangan dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan kerangka pengembangan good environmental governance.</p>	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan mengenai pengertian hukum Lingkungan 2. Menguraikan Permasalah global lingkungan 3. Menguraikan Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup 4. Menguraikan Urgensi lingkungan hidup 5. Menguraikan Hukum kebiasaan internasional 6. Menguraikan Instrument adminisitrasи lingkungan 7. Menguraikan Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif 8. Menguraikan Mekanisme penegakan instrument hukum adminstratif lingkungan hidup 9. Menguraikan Ragam sanksi administratif 10. Menguraikan instrument hukum perdata lingkungan hidup: 11. Menguraikan Instumen hukum perdata classs action 12. Menguraikan Instrumen hukum perdata legal standing 13. Menguraikan Instrumen hukum pidana lingkungan 14. Menguraikan ADR 	
PUSTAKA	UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i>, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009. 2. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue for Environmental Legislation in Developing Countries</i>, The United Nations University, The Netherlands.2005. 3. Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i>, University of Maastricht, The Netherlands, 2005. 4. David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i>, Van Vallenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.
	PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Lingkungan, Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta.

	<p>2. Rangkuti, siti sundari, 1991, inovasi hukum lingkungan: dari ius contitutum ke ius contituendum, airlangga university press, Surabaya.</p> <p>3. Rangkuti, siti sundari, 2005, lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional, airlangga university press, Surabaya.</p> <p>4. UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>5. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.</p>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Whiteboard, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	1. Cunduk Wasiati, SH, MHum 2. Roni Sulistyanto Luhukay, SH, MH
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menjelaskan pengertian ekosistem, lingkungan dan Urgensi lingkungan dan permasalahan-permasalahan Global Lingkungan hidup	<p>Mampu memahami dan menjelaskan seputar:</p> <p>1.Penger-tian hukum ling-kungan;</p> <p>2.Meng-identifikasi, dan member contoh kasus dan per-masalahan ling-kungan global, baik skala lokal, nasional, regional dan inter-nasional</p> <p>3.Meng-identifikasi dan menemukan bahwa kapitalisme sebagai penyebab utama permasalahan utama lingkungan global;</p> <p>4. Pengertian ekosistem</p> <p>5. Pengertian lingkung-an;</p> <p>6. Urgensi lingkungan.</p>	Portofolio tes essay	Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.	<p>Menyajikan tentang</p> <p>1. Pendahuluan;</p> <p>2. Pengantar mengenai pengertian hukum Lingkungan;</p> <p>3. Permasalah global lingkungan;</p> <p>4. Pemutaran video kerusakan linguan;</p> <p>5. Pengertian ekosistem;</p> <p>6. Pengertian lingkungan;</p> <p>1. 7. Urgensi lingkungan.</p>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Menjelaskan hukum lingkungan internasional dan tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan hidup.	Mampu Menjelaskan dan mengidentifikasi: 1. sejarah dan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan; 2. Tanggung jawab Negara/ pihak peratifikasi konvensi inter-nasional tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.	Portofolio dan tes essay	Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.	Menyajikan tentang: 1. Hukum kebiasaan inter-nasional; 2.- Deklarasi Stockholm 1972; a. Konvensi Montevideo 1981; b. Deklarasi Nairobi 1982 c. Konvensi Rio 1992; d. Word Summit Substainabel Governance; 3. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. 2.4. Tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan.	7%
3	Menjelaskan instrumen administrasi lingkungan	Mampu Menjelaskan dan memahmi pentingnya instrument administrasi lingkungan sebagai saluran utama yang paling penting dan efektif dalam pencegahan dan penataan kerusakan lingkungan, serta mampu menunjukan dasar hukum berbagai ketentuan	Portofolio dan tes essay	Pembelajaran kooperatif, diskusi dan latihan	Instrument administrasi lingkungan: 1. Hidden Ordonantie 7 UKL-UPL; 2. AMDAL; 3. Instrumen ekonomi;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		instrument admionstrasi dalam UU No. 32 tahun 2009			perencana-an pem-bangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif.	
4	Menjelaskan penegakan instrument hukum administratif	Mampu Menjelaskan dan memahami penegakan instrument hukum adminstratif dan macam-macam sanksi dalam instrument administratif	Portofolio tes essay	Ceramah dan diskusi	1. Mekanisme penegakan instrument hukum adminstratif lingkungan hidup 2. Ragam sanksi administratif	7%
5	Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan hidup	Mampu Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan, baik dasar hukum dalam hukum positif maupun hasil-hasil putusan pengadilan.	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif.	Instrument perdata lingkungan hidup: 1. Dasar hukum instrument perdata; 2. Mekanisme gugatana perdata biasa; 3. Kelemahan gugatan perdata biasa; 2. 4. Beban pembuktian gugatan perdata biasa.	7%
6	Memahami dan menjelaskan instumen hukum	Mampu menjelaskan instumen hukum perdata <i>classss action</i> dan	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif	1. Instumen hukum perdata <i>classss action</i> ;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perdata dengan <i>class action</i> dan penegakannya	penegakannya, serta dasar hukum yang menjadi landasannya.			2. Penegakan instrumen hukum perdata dengan <i>class Action</i> ; 3. Contoh kasus gugatan <i>class action</i> .	
7	Menjelaskan instrumen hukum perdata dengan <i>Legal Standing</i> dan penegakannya.	- Mampu memhami dan menjelaskan instrumen hukum perdata <i>Legal Standing</i> dan penegakannya serta kasus-kasus yang pernah dilakukan	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi.	Instrumen hukum perdata dengan <i>legal standing</i> : 1. Latar belakang <i>legal standing</i> ; 2. Dasar hukum <i>legal standing</i> ; 3. Penegakan hukum <i>legal standing</i> 4. Syarat-syarat <i>legal standing</i> 5. Contoh kasus yang digugat dengan instrumen legal standing	7%
8	Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakannya	Mampu Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakannya	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif	Instrumen hukum pidana lingkungan. 1.Penegakan hukum pidana; 2.Sistem pembuktian pdiana lingkungan;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Macam pemidanaan; 4. <i>Strict liability</i> dalam B3.	
9	Menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan	Mampu menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mulai dari latar belakang kemunculan-nya, kelebihan dan kekurangan-nya, serta contoh kasus	Portofolio, Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif	1. Latar belakang munculnya ADR; 2. Negosiasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan; 3. Mediasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan.	7%
10	Menjelaskan dan memahami arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan	1. Mampu Menjelaskan dan memahami arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan; 2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrasi;	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif	1. arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan; 2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrasi;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Mampu menunjukkan kasus baik internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dengan arbitrase.			3. kasus internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dengan arbitrase;	
11	Menjelaskan sengketa lingkungan hidup	Mampu Menjelaskan tentang Sengketa lingkungan hidup	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	1. Pengertian sengketa lingkungan hidup 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	7%
12	Penegakan hukum lingkungan	Mampu menjelaskan tentang solar time and solar angle, Solar radiation, Solar heating systems	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	1. Penegakan hukum lingkungan administratifkeper dataan dan kepidanaan 2. Analisis kasus lingkungan hidup dari perspektif aspek hukum lingkungan administratifkeper dataan dan kepidanaan	7%
13	Menjelaskan peran serta masyarakat	Mampu mengetahui peran serta masyarakat lewat advokasi dalam penegakan hukum lingkungan, dan	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		karakteristik gerakan advokasi lingkungan				
14	Menjelaskan permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah, dan mendiskusikan tugas review jurnal internasional	1. Mampu mengetahui dan Menjelaskan permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2. Mampu menganalisis penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.	Pertofolio, Tes essay	Presentasi dan diskusi interaktif	1. Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2. Penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.	7%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	Penanggungjawab Keilmuan Said Munawar, SH, MH	Dekan Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.

	<p style="text-align: center;">Universitas Widya Mataram PROGRAM STUDI: HUKUM</p>				
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH: Pendidikan Pancasila	KODE MATA KULIAH: UWM101	RUMPUN MATA KULIAH: Wajib Nasional	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 1	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK: -			Kaprodi
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<p>Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KETERAMPILAN UMUM 2. KETERAMPILAN KHUSUS 3. PENGETAHUAN 			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan konsep dan prinsip ilmu matematika 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Mampu menguasai dan menerapkan konsep, prinsip pada bidang pendidikan matematika dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat. 6. Mampu melakukan riset atau penelitian yang mencakup identifikasi dan analisis masalah 			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang definisi kewarganegaraan, identitas nasional, integritas nasional, konstitusi nasional, hak dan kewajiban, demokrasi, konstitusional, wawasan nusantara
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. definisi kewarganegaraan, 2. identitas nasional, 3. integritas nasional, 4. konstitusi nasional, 5. hak dan kewajiban,

	6. demokrasi, 7. konstitusional, 8. wawasan nusantara
PUSTAKA	<p>UTAMA</p> <p>1. Ristekdikti, 2016, <i>Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum : Pendidikan Pancasila</i>, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</p>
	<p>PENDUKUNG</p> <p>1. Buku Ajar Mata kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi oleh Kementerian Riset Tenologi dan Pendidikan Tingg Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2. Khaelan: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Paradigma: 2012. 3. Winarno: Pendidikan Kewarganegaraan. Global:2012 4. Sunarso, dkk 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Uny.Press 5. Riyanto, A, 2009, Teori konstitusi, Bandung, Penerbit Ya pemdo</p>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	<p>1. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. 2. Edy Chrisjanto, S.E., S.H., M.H. 3. Asma Karim, S.H., M.H.</p>
MATA KULIAH SYARAT	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Kontrak Perkuliahan Mahasiswa mampu memahami kontak perkuliahan dan rencana pembelajaran dan memahami latar	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan : 1. latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan	<p>Kriteria: Rubrik kriteria grading</p> <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes Tertulis • Performance <p>TM: 2x(3x50'')</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion 	<p>Bentuk: Kuliah online by Google Classroom</p> <p>Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan</p> <p>PT:</p>	Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan	7

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	belakang,pengertian, tujuan, dan manfaat Pendidikan Kewarganegaraan	2. Pengertian, tujuan, dan manfaat Pendidikan Kewarganegaraan.			2x(3x60'') BM: 2x(3x60'')		
3, 4	Mahasiswa diharapkan mampu mengenali karakteristik identitas terhadap berbagai hal yang akan menghilangkan identitas nasional sehingga dapat memiliki daya tangkal nasional Indonesia.	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mempu menjelaskan : 1. Pengertian Identitas Nasional; 2. Menjelaskan karakteristik identitas nasional 3. fakto pendukung kelahiran identitas nasional 5. Menganalisis tentang Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan sebagai paham yang mengantarkan pada	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk test: • Tes Tertulis • Performance	• Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion TM: 2x(3x50'')	Bentuk: Kuliah online by Google Classroom Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan PT: 2x(3x60'') BM: 2x(3x60'')	Identitas nasional	7

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kONSEP IDENTITAS NASIONAL;					
5	Mahasiswa diharapkan mampu mengenali integritas nasional	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mempu menjelaskan : 1.Pengertian dan makna integritas 2.Tujuan dan manfaat integritas nasional 3.Jenis-jenis integritas 4.Perkembangan sejarah integritas nasional 5.Dinamika integritas	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk test: • Tes Tertulis • Performance	• Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion TM: 1x(3x50'')	Bentuk: Kuliah online by Google Classroom Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan PT: 1x(3x60'') BM: 1x(3x60'')	Integritas	5
6, 7	Mahasiswa diharapkan mampu mengenali hak dan kewajiban warga Negara dalam demokrasi	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian : 1. bangsa dan Negara; 2. Penduduk dan warga Pengertian Negara; 3. Asas kewarganegaraan;	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk test: • Tes Tertulis • Performance	• Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion TM: 2x(3x50'')	Bentuk: Kuliah online by Google Classroom Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan PT: 2x(3x60'') BM:	Hak dan kewajiban warga Negara	7

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Problem status kewarganegaraan; 5. Hak Warga Negara 6. Kewajiban Warga Negara; 7. Kewajiban Negara dan Pemerintah;			2x(3x60'')		
8	UTS						30
9, 10	Mahasiswa diharapkan mampu mengenali karakteristik demokrasi Indonesia	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan : 1. Pengertian demokrasi. 2. Bentuk-bentuk demokrasi. 3. Nilai-nialai demokrasi. 4. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. 5. Perkembangan paham demokrasi . 6. Implementasi demokrasi	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk test: • Tes Tertulis • Performance	• Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion TM: 2x(3x50'')	Bentuk: Kuliah online by Google Classroom Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan PT: 2x(3x60'') BM: 2x(3x60'')	Demokrasi Indonesia	7

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Mahasiswa Dapat Menjelaskan Konsep Dasar Ketatanegaraan Secara Konstitusional, Hasil Amandemen UUD 1945, Hubungan Antara Lembaga- Lembaga	<p>Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian negara dan konstirusi 2. Sifat, fungsi dan unsur Negara 3. Peranan Negara dan konstitusi 4. UUD sebagai konstitusi negera Indonesia mengatur social, politik, kultur dan kontek penegakan hukum 	<p>Kriteria: Rubrik kriteria grading</p> <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes Tertulis • Performance 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion <p>TM: 1x(3x50'')</p>	<p>Bentuk: Kuliah online by Google Classroom</p> <p>Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan</p> <p>PT: 1x(3x60'')</p> <p>BM: 1x(3x60'')</p>	Negara dan konstitusional	8
12,13	Mahasiswa Dapat Menjelaskan Konsep wawasan nusantara	<p>Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.pengertian wawasan nusantara 	<p>Kriteria: Rubrik kriteria grading</p> <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes Tertulis • Performance 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion <p>TM: 2x(3x50'')</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Bentuk: Kuliah online by Google Classroom</p> <p>Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan</p> <p>PT: 2x(3x60'')</p>	Wawasan nusantara	8

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring(<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2.implementasi wawasan nusantara. 3.Menggali sumber histori, agama, kultur tentang wawasan nusantara 4.Urgensi wawasan nusantara			BM: 2x(3x60")		
14,15	Mhsiswa dapat menjelaskan ketahanan Nasional	Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1.Pengertian ketahanan Nasional 2.Tantangan pertanaman nsional 3.Menggali sumber historis, sosiologid dan politik tentang ketahanan nsionl dan pela Negara 4.Urgensi ketahanan nasional dan bela negara	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk test: • Tes Tertulis • Performance	• Bentuk: Kuliah • Metode: Small Group Discussion TM: 2x(3x50")	Bentuk: Kuliah online by Google Classroom Metode: Direct Instruction, Tanya jawab dan penugasan PT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Ketahanan Nasional	7

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Fifink Praiseda A., S.H., M.H.		Said Munawar, S.H., M.H.	Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.H.